



KR-Surya Adi Lesmana

PROKES DI PASAR PAKEM: Pasar Pakem di Jalan Kaliurang Sleman riuh oleh pedagang dan pembeli saat masa perpanjangan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Sabtu (13/2). Warga di wilayah Sleman termasuk juga lingkungan pasar, diharapkan tak pernah bosan dan selalu patuh pada protokol kesehatan agar PTKM tak lagi diperpanjang dan situasi bisa kembali normal.

UNTUK DAERAH PINGGIRAN

Komisi D Usulkan Pembelajaran Gunakan HT

SLEMAN (KR) - Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mengusulkan pembelajaran selama proses daring menggunakan Handy Talky (HT) untuk di wilayah pinggiran. Tujuannya menghindari *blank spot* dan lebih hemat karena tidak menggunakan pulsa seluler.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Yani Fathurahman mengatakan, pembelajaran menggunakan HT ini sudah diterapkan di tiga SD wilayah Cangkringan yaitu SD Kepuharjo, Banaran dan Pusalang. Pembelajaran ini bekerjasama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan radio komunitas.

"Wilayah pinggiran itu terkadang susah sinyal. Tapi dengan menggunakan HT, pembelajaran secara daring tidak ada kendala. Salah satunya sudah dipraktikkan tiga SD di Cangkringan," kata Yani kepada KR, Minggu (14/2).

Menurutnya, nilai positif pembelajaran menggunakan HT ini tidak menggunakan pulsa dan tidak ada *blank spot*. Kemudian guru akan lebih interaktif dalam proses pembelajaran dengan

anak. "Jadi guru tidak sekedar memberikan tugas saja. Tapi guru akan lebih bisa interaktif dengan anak-anak. Soalnya guru dan anak selalu dituntut untuk bicara," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, memang pendidikan dengan IT tidak bisa dimunafikan karena tuntutan zaman dan keadaan. Namun pembelajaran dengan HP juga memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan anak. "Terkadang anak itu tidak terkontrol dalam menggunakan HP. Selain itu dari segi kesehatan, khususnya radiasi HP juga tidak bagus," ujarnya.

Untuk itu, Komisi D mengusulkan pembelajaran menggunakan HT. Mungkin tidak semua sekolah, namun diutamakan di daerah pinggiran. Mengingat di daerah pinggiran masih banyak warga yang rentan miskin dan miskin. "Pemda bisa memfasilitasi HT ini untuk warga yang rentan miskin dan miskin. Tujuan dengan pembelajaran menggunakan HT ini supaya pembelajaran lebih maksimal hasilnya," pungkas Yani. (Sni)-f

STTA dan Poltekkes Adisutjipto Tingkatkan Kinerja

SLEMAN (KR) - Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) dan Poltekkes TNI AU Adisutjipto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Yayasan TNI AU Adipraya (Yasau) secara virtual. Dalam kesempatan itu, STTA dan Poltekkes Adisutjipto diminta meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan dengan mengedepankan spesifikasi kedingan-taraan.

Ketua Umum Yasau Marsma TNI (Purn) Dr Samto Hadi Isnanto SE MA mengatakan, persaingan dunia pendidikan sekarang ini semakin ketat. Untuk itu STTA dan Poltekkes Adisutjipto diminta lebih meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan.

"Kinerja dan kualitas pendidikan dari STTA dan Poltekkes Adisutjipto dengan mengedepankan spesifikasi kedingan-taraan. Sehingga mampu bersaing secara global," kata Ketua Umum Yasau, ke-

marin.

Dalam Rakor tersebut, Direktur Poltekkes TNI AU Adisutjipto Drs Purwanto Budi T MM Apt dan Ketua STTA Marsma TNI (Purn) Dr Ir Drs T Ken Darmastono MSc juga diminta memaparkan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu per-1 September 2020 sampai dengan per-30 Januari 2021. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan arahan sekaligus penekanan Ketua Umum Yasau.

Ketum Yasau berharap, pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan dengan mengedepankan Good Univercity Governance. Tujuannya memberikan kepuasan kepada stakeholder. "Utamanya para mahasiswa, agar mereka dapat meraih predikat lulusan yang dapat dibanggakan dan mampu bersaing di dunia kerja," pintanya. (Sni)-f

MELALUI DANA ASPIRASI

Tahun Ini, Jembatan Gantung di Berbah Dibangun



KR-Istimewa

Sukanto saat meninjau lokasi tempat yang akan dibangun jembatan gantung di Berbah.

BERBAH (KR) - Jembatan gantung di Kapanewon Berbah akan dibangun pada tahun ini. Jembatan yang menghubungkan Padukuhan Karang Kalitirto dengan Padukuhan Ngentak Jogotirto tersebut rencananya dibangun pemerintah melalui dana aspirasi DPR RI.

Demikian disampaikan anggota DPR RI H Sukanto SH, Sabtu (13/2). "Ini merupakan bagian as-

PUPKP Sleman Taupiq Wahyudi dan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR. Selain itu juga melakukan pertemuan dengan pihak kalurahan setempat.

Dijelaskan Sukanto, jembatan gantung tersebut hanya dapat diakses dengan jalan kaki, sepeda motor dan bukan dengan kendaraan roda empat. "Yang paling penting hadirnya jembatan gantung ini diharapkan bisa memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan perekonomian kedua kalurahan dan sekitarnya," ujar anggota F-PKB.

Selain jembatan gantung, Sukanto juga sudah menyalurkan beberapa program yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat DIY. Seperti program RTLH bagi 1.500 rumah di DIY di mana 800 unit berada di wilayah Sleman. (Jon)-f

KEMUNGKINAN DITUNDA

Pelantikan Bupati Belum Ada Kepastian

SLEMAN (KR) - Masa jabatan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sri Muslimatun tinggal tiga hari lagi. Namun sampai saat ini rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kustini Sri Purnomo - Danang Maharsa belum ada kepastian dan kemungkinan ditunda.

"Hingga saat ini, belum ada kepastian bupati dan wakil bupati terpilih. Kemungkinan untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Gubernur DIY akan mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sleman," ungkap Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta kepada KR, Minggu (14/2).

Diterangkan Haris, beberapa waktu lalu pihaknya mendapat Surat Edaran (SE) dari Kemendagri No 120/738/OTDA tertanggal 3

Februari 2021, di mana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih menunggu hasil sengketa Pilkada yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi bupati dan wakil bupati yang masa jabatannya berakhir 17 Februari, nanti Gubernur akan menunjuk Sekda sebagai Plt Bupati.

"Jika mengacu SE, kemungkinan nanti pelantikannya serentak se-Indonesia. Tapi menunggu hasil sengketa Pilkada daerah lain yang sedang berjalan di MK. Untuk mengisi kekosongan kepala daerah,

Gubernur akan menunjuk Sekda sebagai Plh Bupati Sleman sampai ada kepastian pelantikan," terang politisi dari PDI Perjuangan ini.

Menurut Haris, semua tahapan sudah dilalui. Bahkan beberapa waktu lalu, DPRD Sleman telah menggelar rapat paripurna (rapur) usulan pengesahan pengangkatan Dra Hj Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa SE sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sleman terpilih. Hasil rapur tersebut telah disampaikan ke Kemendagri melalui Gubernur DIY.

"Surat usulan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih sudah kami layangkan ke Kemendagri melalui Gubernur. Saat ini kami tinggal menunggu jadwal pelantikan dari Kemendagri," tandasnya. (Sni)-f

MASYARAKAT TAK BOLEH LENGAH

Tak Ada RT Masuk Kategori Zona Merah

SLEMAN (KR) - Dari sekitar 7.414 Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Sleman, tidak ada yang masuk kategori zona merah epidemiologi Covid-19. Namun hal ini tidak boleh menjadikan masyarakat lengah dan abai dengan protokol kesehatan.

"Dari sekitar 7.414 RT di Sleman, hanya ditemukan satu RT yang masuk zona orange dan 552 RT yang masuk zona kuning. Sisanya, masuk zona hijau. Satu RT yang masuk zona oranye hanya berada di satu Kapanewon (Go-dean), sementara RT yang masuk zona kuning berada di semua kapanewon," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo kepada wartawan, Minggu (14/2).

Menurut Joko, sejak awal sudah memprediksi kalau mengacu kriteria sesuai Imendagri no 3/2021 ti-

dak akan ada RT di Sleman yang masuk zona merah. Dengan kriteria tersebut mayoritas RT diprediksi masuk zona hijau dan kuning, hanya sangat sedikit yang oranye. "Memang menjadi agak surmir karena di level nasional, Kabupaten Sleman termasuk yang perlu mendapat perhatian khusus karena angka penambahan kasus baru tinggi dan yang meninggal dunia pun banyak. Tetapi kok seolah-olah tingkat penularan rendah?," ujarnya.

Joko menduga, hal itu terjadi karena penyebaran Covid-19 terjadi massif dan merata di hampir semua wilayah serta tidak mengumpul pada wilayah tertentu. Kondisi ini dapat dilihat dari sebaran peta epidemiologi Covid-19 pada 19 Januari lalu di mana sebanyak 14 kapanewon masuk zona merah.

Sebelumnya, Bupati Sleman Sri Purnomo mengeluarkan Instruksi No.4/INSTR/2021 terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Selain melonggarkan aturan dibandingkan instruksi sebelumnya, pada instruksi terbaru ini juga memuat aturan PPKM hingga tingkat RT/RW yang berpotensi terjadi penyebaran Covid-19. Penanganan PPKM berbasis Mikro di tingkat RT RW ditopang oleh kalurahan. Satgas ditingkat padukuhan menjadi pusat untuk koordinasi antar RT/RW.

"Koordinasi dilakukan untuk menyuplai kebutuhan warga yang menjalani karantina. Kebutuhan dananya dari dana desa. Untuk proses pengobatan tetap ditanggung oleh Pemkab," kata Bupati. (Has)-f

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.